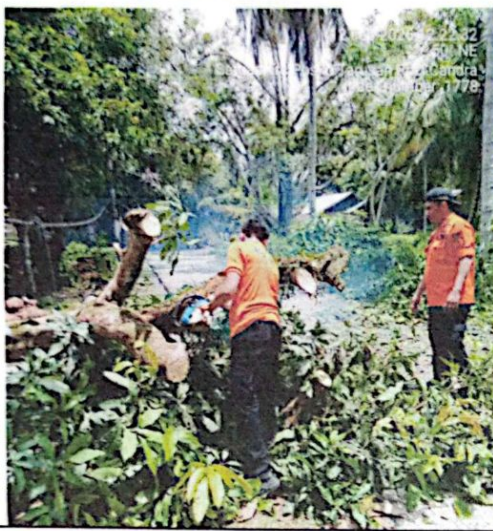




LAPORAN KINERJA (LKJ) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

ditarima Tgl. 27/2/2026

Sat
Apri Junardi, S.E., M.P.A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.


LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Urusan BPBD Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Diharapkan LKj ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Masih disadari bahwa dalam penyusunan LKj ini masih terdapat kekurangan- kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan LKj ini. Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga LKj ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga LKj ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor BPBD di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 19 Februari 2026

↳ Kepala Pelaksana


ARMEN, AP,MM
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19740207 199311 1001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tujuan Jangka Menengah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Rencana Strategis instansi Tahun 2021-2025 adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Berkinerja tinggi untuk Menurunkan risiko Dan Dampak Bencana di Kabupaten pesisir Selatan”** dengan indikator Tujuan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan bencana lima tahun ke depan tahun 2021-2025 BPBD Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan strategi yaitu :

1. Peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aman Bencana
3. Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan
4. Peningkatan peran desa/desa adat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
5. Pengembangan Sistem Peringatan dini dan penerapan infratraktur aman bencana
6. Penguatan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
7. Penyediaan Sarana Prasarana Tanggap Darurat
8. Meningkatkan Kerjasama antar lembaga

Strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan teknis operasional yang lebih terarah dan terukur untuk pencapaian sasaran tersebut dan kemudian menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2025, dimana indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program yang jelas dan terukur. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2025.

A. Capaian Kinerja

Ringkasan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP BPBD	Nilai	BB (77)	B (67,67)	87,88
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai	91	90	99
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	Jumlah	12	3	25
		2. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama	Jumlah	6	0	
		3. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	Jumlah	5	0	

B. Kinerja Keuangan

Adapun Realisasi anggaran pada BPBD Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.814.110.800 (Lima Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.5.069.147.226 (87,18) sedangkan realisasi fisik sudah dapat dilaksanakan seluruhnya atau 90%. Sedangkan Sisa anggaran sebesar Rp.744.963.574 (14,69%) merupakan dampak dari efisiensi anggaran dan sisa penawaran harga dari penyedia barang dan jasa.

Kesimpulan :

- Sebagian besar target kinerja pada tahun 2025 sudah dapat dicapai diatas target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah dapat berjalan dengan baik.
- Hanya terdapat satu sasaran yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu Persentase terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana), dimana pada tahun 2025 belum dapat dibentuk Destana Baru karena pelaksanaan kegiatan Pelatihan bagi Fasilitator Destana baru dilaksanakan pada Triwulan ke-IV pada Bulan Desember sehingga pada tahun 2025 belum dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Destana.
- Kinerja keuangan BPBD kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai 87,18 % dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah terlaksana seluruhnya atau capaian fisik 95,70%, menunjukkan bahwa BPBD sudah dapat mengelola keuangan dengan efektif dan efisien, walaupun ditengah- tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah Pusat maupun Daerah.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghalang/ Penghambat Kinerja

1. Masalah keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
2. Keterbatasan anggaran pada kegiatan prioritas yang berimplikasi terhadap berkurangnya cakupan layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan
3. Masih Rendahnya kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat terhadap keterlibatan dalam upaya-upaya penanggulangan bencana
4. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan organisasi lainnya dapat menghambat upaya penanggulangan bencana
5. Kurangnya informasi tentang bencana, seperti peringatan dini dan peta resiko, dapat menghambat upaya penanggulangan bencana
6. Keterbatasan infrastruktur seperti masih kurangnya sistem peringatan dini serta sarana dan prasarana dan kelengkapan penanggulangan bencana yang dapat menghambat upaya penanggulangan bencana
7. Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Gambaran Umum.....	4
1.5 Kepegawaian.....	10
1.6 Sarana Prasarana.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	13
2.2 Rencana Kinerja Anggaran	15
2.3 Perjanjian Kinerj.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. Metodologi Penilaian	22
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	24
3.3 Capaian Kinerja	26
3.4 Realisasi Anggaran	35
3.5Capaian Kinerja	36
BAB IV PENUTUP.....	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	10
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/Golongan.....	10
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel 1.4	Data Peralatan/Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan BPBD tahun 2021-2025.....	14
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD. 2021-2025.....	15
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah.....	17
Tabel 2.4	Indikator Target/Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Tahun 2025.....	17
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	20
Tabel 3.1	Klarifikasi Penilaian	23
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran.....	25
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi	27
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Indikator.....	28
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	28
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Sakip	29
Tabel 3.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
Tabel 3.8	Perbandingan target dan Realisasi.....	33
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja.....	31
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	34
Tabel 3.11	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	34
Tabel 3.12	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Disamping itu, Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini merupakan realisasi dan capaian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, akan dikemukakan secara singkat tentang hasil pengukuran terhadap Indikator-indikator dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pencapaian Tujuan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, demikian pula langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala yang kemungkinan akan terjadi pada saat mendatang.:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini merupakan masa tahun pertama dari periode 5 (lima) tahunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2025, dimana Renstra BPBD adalah merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap bidang urusan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberikan laporan kegiatan secara transparan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
4. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target tujuan dan sasaran strategis pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan, melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
2. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 6) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Permenpan RB No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Gambaran Umum

a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana daerah dibidang Penanggulangan Bencana dibawah tanggung jawab Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon II) sebagai mana tercantum dalam Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diubah dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan

Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Penambahan Bidang Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua) seksi yaitu Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran dan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran . Pada Tahun 2016 Terjadi Perubahan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 maka 1 (satu) Bidang Pemadam Kebakaran tidak berada dalam Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimulai Tahun 2017.

Fungsi Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri Dari :

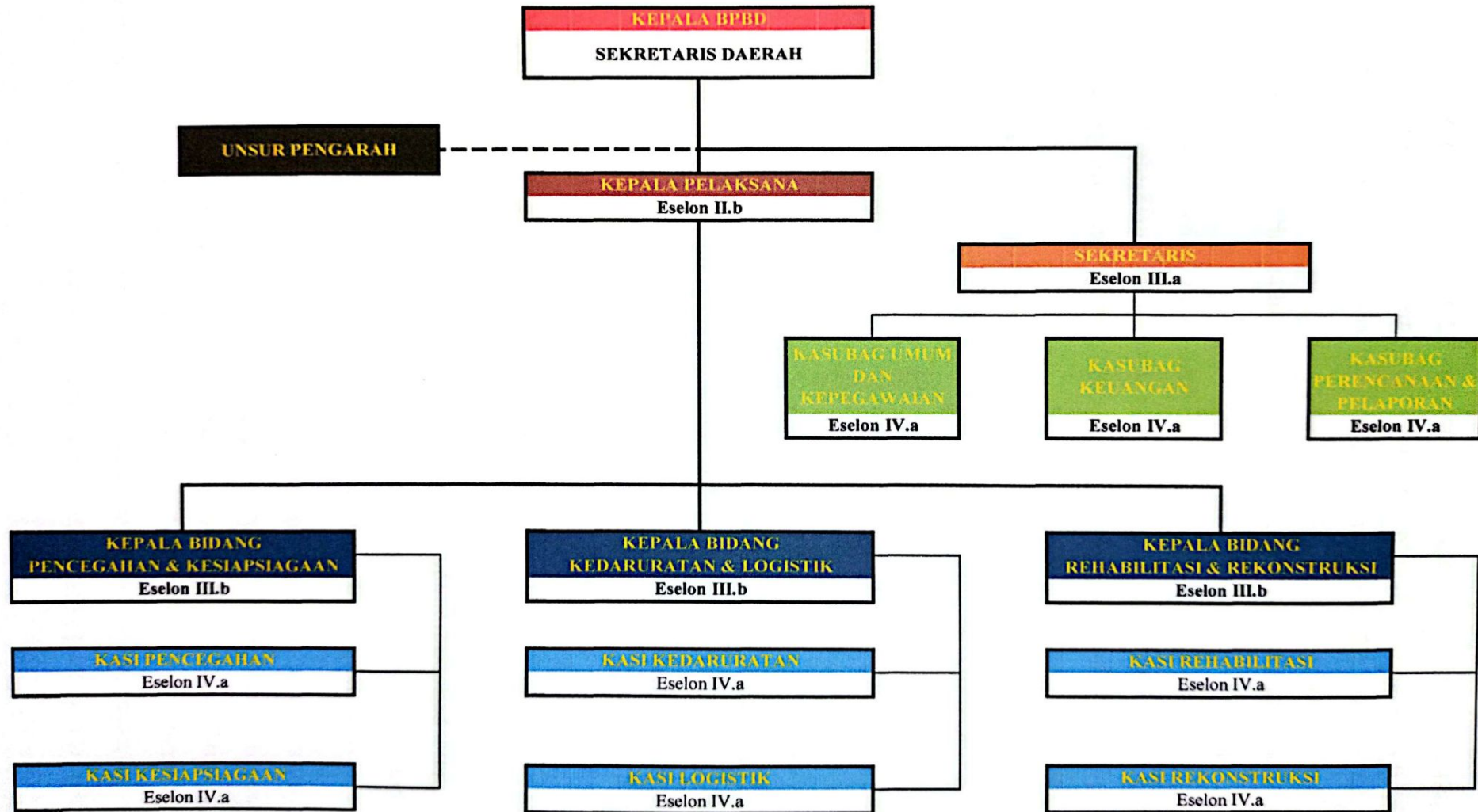
1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan.
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan
 - b. Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi.
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BPBD
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014**



b. Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten. Adapun Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut Undang Undang No.24 Tahun 2007 adalah :

menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

1. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
3. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
4. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

sedangkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang "Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan" dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok

yaitu Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Fungsi dari BPBD Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup tugasnya
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan

Adapun isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi. Indonesia memiliki potensi bencana geologi yang tinggi karena letaknya di pertemuan tiga lempeng tektonik.
 - Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi Akibat Perubahan Iklim. Perubahan iklim global meningkatkan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
 - Peningkatan Alih Fungsi Lahan dan Percepatan Perkembangan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi. Alih fungsi lahan dan perkembangan kawasan investasi dapat meningkatkan risiko bencana.
 - Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Aktor Pentahelix.
 - Pengelolaan Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan
 - Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana
- Sedangkan beberapa permasalahan lain yang mempengaruhi pelaksanaan

penanggulangan bencana yaitu:

a. Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

- Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Risiko Bencana
- Kurangnya Sistem Peringatan Dini yang Efektif dan Menjangkau Seluruh Wilayah Rawan Bencana
- Masih Terbatasnya Peta Rawan Bencana yang Akurat dan Terbaru

b. Kapasitas Sumber Daya

- Terbatasnya Personel yang Terlatih Secara Profesional dalam Penanggulangan Bencana
 - Keterbatasan Anggaran untuk Kegiatan Mitigasi dan Penanganan Darurat Bencana
 - Minimnya Sarana dan Prasarana yang Memadai (alat evakuasi, logistik, komunikasi darurat, dll)
- c. Koordinasi dan Sinergi Antar Instansi
- Lemahnya koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
 - Kurangnya pelibatan aktif masyarakat, sektor swasta, dan LSM dalam manajemen risiko bencana.
- d. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan sistem digital dalam pemantauan, pelaporan, dan penanganan bencana.
 - Data kebencanaan yang belum terintegrasi secara baik antar wilayah.
- e. Perubahan Iklim dan Degradasi Lingkungan
- Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim (banjir, kekeringan, kebakaran hutan).
 - Kerusakan lingkungan (deforestasi, alih fungsi lahan) yang memperparah risiko bencana.

1.5 Kepegawaian

Berdasarkan keadaan pada akhir tahun 2025 jumlah pegawai BPBD Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 79 orang yang seluruhnya sudah berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	ASN	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	20	15	5
2	P3K	18	16	2
3	P3K Paruh Waktu	41	38	3
JUMLAH		79	69	10

Sumber : Sekretariat BPBD Kab.Pesisir Selatan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	ASN	JML	Pangkat/ Golongan											
			II				III				IV			
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	PNS	20	-	-	2	-	-	3	1	9	4	-	1	-
2	P3K	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	P3K Paruh Waktu	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JML		79											

Sumber : Sekretariat BPBD Kab.Pesisir Selatan

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	ASN	Jumlah	Tingkat Pendidikan							
			SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	
1	PNS	20	-	-	1	-	1	12	6	
2	P3K	18	-	-	18	-	-	-	-	
3	P3K Paruh Waktu	41	-	-	9	-	-	3	-	
	Jumlah	46	-	-	39	-	-	2	-	

Sumber : Sekretariat BPBD Kab.Pesisir Selatan

1.6 Sarana dan Prasarana.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD kabupaten Pesisir Selatan didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data Peralatan/Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat
1	Mobil Ambulance	1	Baik
2	Mobil Oprasional	8	Baik
3	Mobil Komando D-Max		
4	Mobil Komando Teriton	1	Baik
5	Mobil Dapur Umum Lapangan	3	Baik
6	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Perahu Karet Tak Bermotor Khusus) Bermotor	6	2 Baik 4 Rusak
7	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Perahu Karet Tak Bermotor Khusus) Bermotor		
8	Torpedo Bouy		
9	Mesin Gerinda Tangan		
10	Mesin Bor Tangan		

11	Alat Penarik Kapal ()		
12	Mesin Penghisap Debu/Vacuum		
13	Mesin Pemotong Rumput/ Yamamak		
14	Tandon Air		
15	Pelampung/ Ring Bouy	6	Baik
16	Chainsaw kecil	15	Baik
17	Chainsaw tanggung	1	Baik
18	Chainsaw besar	2	Baik
19	Genzet	8	Baik
20	Motor Trail	6	Baik
21	Motor X-Ride		
22	Motor Hondaa CFR-150	3	Baik
23	Pompa Portabel	3	Baik
24	HT		
25	Pesawat rage		
26	Life Jackt		
27	Senter Kepala	6	Baik
28	Sepatu Scuba		
29	Tali Wibbing		
30	Tenda Peleton	6	Baik
NO	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat
31	Tenda Pengungsi		
32	Tenda Keluarga	15	Baik
33	Pompa Jinjing		
34	Pompa Alkon		
35	Selang Polyster Predator		
36	Selang Polyster Appron		
37	Selang Pemadam		
38	Nozel	1	Baik
39	Helem JYJX/OEM		
40	Truk Tangki Air	1	Baik

Sumber Data Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab.Pesisir Selatan

Berdasarkan analisis terhadap kebutuhan ketersediaan Peralatan dan logistik yang tersedia pada BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, secara umum dapat dikatakan bahwa masih banyak yang perlu dilengkapi untuk lebih mendukung penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan mengingat Intensitas Kejadian Bencana menunjukkan adanya peningkatan Jumlah Kejadian dari Tahun ketahun.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang mempengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan. Efektifnya perencanaan strategis suatu Perangkat Daerah apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah sekarang, bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja Perangkat Daerah dalam upaya mencapai gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 memuat Visi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu ***“Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional”***

Dari keenam misi Kabupaten Pesisir Selatan, maka **misi 6** adalah misi yang sesuai dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Misi 6 tersebut adalah **“Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, Tentram dan Dinamis”**

Dari Visi dan Misi pertama Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka

tujuan yang harus dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan-Sasaran-Indikator

VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, Tenram dan Dinamis	1. Terciptannya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatanyang aman, Tenram dan Dinamis	1. Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel yang Berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah
		3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi PD
		2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1. Jumlah Nagari Tangguh Pratama 2. Jumlah Nagari Tangguh Madya 3. Jumlah Nagari Tangguh Utama

Sumber: Renstra BPBD Rasionalisasi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2025

Tabel 2.1-Rasionalisasi Target Kinerja (Renstra)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra/Awal	Realisasi (T-1)	Target Setelah Rasionalisasi
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP PD	BB (77)	B (67,67)	87,88
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Daerah	91	90	99
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga	Jumlah Nagari Tangguh Pratama	12	3	25

	Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Madya	6	0	
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	5	0	

Tabel 2.2- Tujuan Dan Sasaran Strategis

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1	Meningkatkannya tatakelola perangkat daerah yang berkinerja tinggi untuk menurunkan risiko dan dampak bencana di kabupaten pesisir selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi

2.2. Rencana Kinerja

Kinerja memerlukan ukuran sehingga yang dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap standar atau target yang direncanakan. Ukurannya menggunakan indikator yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja yang baik memenuhi unsur spesifik (**S**pecific), terukur (**M**easurable), dapat dicapai secara rasional (**A**chievable), relevan dengan kebijakan yang sedang berjalan (**R**elevant), dan memperhitungkan batas waktu pencapaian (**T**ime-bound). yang disingkat dengan SMART, diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Spesific/Spesifik (S)*; indikator jelas dan focus (tidak menimbulkan multitafsir).
- 2) *Measurable/Terukur (M)*; dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas).
- 3) *Achievable (A)*; dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dengan metode yang sesuai, berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 4) *Result-Oriented/Relevant (R)*; terkait secara logis dengan kebijakan/program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 5) *Time-Bound (T)*; memperhatikan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya, dilakukan dalam jangka

waktu tertentu.

Karena fitur atau metode SMART ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Analisi Situasi :**
Pahami Kondisi Saat ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Termasuk Sumber Daya yang ada Tantangan dan Peluang.
2. **Penetapan Tujuan :**
Tentukan Tujuan yang jelas untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan membimbing penetapan target.
3. **Tujuan Strategis**
Tetapkan Tujuan Strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang
4. **Indikator Kinerja**
Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan- tujuan tersebut.
5. **Target Spesifik**
Tetapkan Target Spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan
6. **Rencana Aksi**
Buat Rencana Terperinci dengan Langkah-Langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Target Tersebut.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional.

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Awal	Revisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkannya tatakelola perangkat daerah yang berkinerja tinggi untuk menurunkan risiko dan dampak bencana di kabupaten pesisir selatan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP PD	Angka	BB (77)	B (67,67)
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Daerah	Angka	91	90
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Pratama	Nagari	12	3
			Jumlah Nagari Tangguh Madya	Nagari	6	0
Jumlah Nagari Tangguh Utama	Nagari	5	0			

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dukungan program/kegiatan sangat perlu diperhatikan seperti tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Penghitungan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP PD	Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi IGA	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Pratama	Peruk BNPB No.1 Tahun 2012 tentang: pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Pratama	Program Penanggulangan Bencana
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	Peruk BNPB No.1 Tahun 2012 tentang: pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Utama	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	Peruk BNPB No.1 Tahun 2012 tentang: pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Madya	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perjanjian Kinerja tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada tahun 2025, dilakukan mekanisme pergeseran/perubahan

anggaran sehingga anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan dapat dialihkan dan dimaksimalkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Pergeseran/perubahan anggaran tercantum dalam dokumen pergeseran/perubahan anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Awal	Revisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP PD	BB (77)	B (67,67)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Daerah	91	90
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Pratama	12	3
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	6	0
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	5	0

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dilihat dari tabel 2.5 di atas, terdapat 5 (Lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, target dihitung berdasarkan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA; dan
- 3) Nilai Nagari Tangguh Pratama, target dihitung berdasarkan Peruk BNPB No.1 Tahun 2012 tentang: pedoman umum Desa/Kelurahan.
- 4) Nilai Nagari TangguhMadya , target dihitung berdasarkan Peruk BNPB No.1 Tahun 2012 tentang: pedoman umum Desa/Kelurahan.
- 5) Nilai Nagari Tangguh Utama, target dihitung berdasarkan Peruk BNPB No.1 Tahun 2012 tentang: pedoman umum Desa/Kelurahan.

Tabel 2.6
Anggaran BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.794.280.976
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.587.533
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.587.533
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.025.611.727
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.784.085.727
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	241.526.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.800.000
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.800.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.309.275
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	4.225.057
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.409.841
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.007.492
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.998.885
e	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.100.000

f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.651.000
g	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	22.916.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.519.980
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.519.980
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.452.461
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.712.461
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.550.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.019.829.824
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	297.077.160
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	47.077.160
b	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	206.833.286
a	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	50.828.165
b	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	17.610.400
c	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0
d	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
e	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	36.394.721
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.427.224.474
a	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
b	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
c	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.339.197.253
d	Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
e	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	86.027.221
3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	88.694.904
a	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	36.720.207
b	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	51.974.697
	J U M L A H	5.814.110.800

Sumber : DPA BPBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan kinerja Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan dengan memenuhi hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping anggaran yang tercantum dalam DPA, dalam keadaan status “Tanggap Darurat Bencana” dan untuk pemberian bantuan sosial bagi korban bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 14 tahun 2024, BPBD dapat pula mengakses dana “Belanja Tidak Terduga” untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanganan bencana baik itu berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana maupun kegiatan pemulihan pasca bencana.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja

3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang memberikan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel. 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84 %	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP BPBD	Nilai	BB (77)	B (67,67)	87,88
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai	91	90	99
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama	Jumlah	12	3	25
		2. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama	Jumlah	6	0	
		3. Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya	Jumlah	5	0	

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 ini ada 5 (Lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu :

1) Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja

❖ Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target A (87,5). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah BB (75,72) atau sebesar 86,19% dengan predikat **baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan

Bencana Daerah. Nilai Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini memakai nilai evaluasi tahun 2023 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh pada bulan maret tahun 2025.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

- ❖ Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target 100,00. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 89,00 atau sebesar 89,00% dengan predikat **sangat baik**.
Capaian Rata- Rata ke 3 (Tiga) Indikator Kinerja tersebut diatas adalah 85,51%.

3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

a) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Pratama dengan target 15 nagari tercapai 7 nagari pratama yaitu

- Nagari Sei Nyalo Mudiak Aie
- Ganting Mudik Selatan
- Langkitan
- Nagari Durian Seribu
- Duku Utara
- Barung- Barung Belantai Tengah
- Pulau Karam

Nagari Pratama dibentuk dengan murni dana Nagari

b) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Madya dengan Target 15 Tercapai 6 Nagari, 3 Nagari Pratama yang menjadi madya oleh Dana Jamari Sakato Yaitu

- Nagari Duku
- Nagari Duku Utara
- Nagari Barung-Barung Belantai Tengah

Target tahun 2024 nagari tangguh madya 2 nagari tercapai 6 nagari dikarenakan bantuan Dana dari Jamari Sakato dan Dana M60 IDRIP BNPB..

c) Jumlah Nagari Tangguh Bencana Utama dari target 5 tercapai 3 nagari yang di Danai Oleh Dana IDRIP BNPB Yaitu :

- Nagari Ampang Pulai

3.3 CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a) Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tanpa Satuan	B (77)	BB (67,67)*	87,88%
Rata-rata capaian (%)						87,88%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2025
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

b Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BB (75,72)	A (87,5)*	B(67,67)*

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A (87,5)*	AA (90,43)	96,66	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai Sakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumbar	Kementerian Republik Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	B (67,67)	BB (75,72)*	BB**

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

***) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : 1. Dinas Perkebunan, TP dan Hortikultura Prov. Sumbar
2. <http://1data.menpan.go.id>

e Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

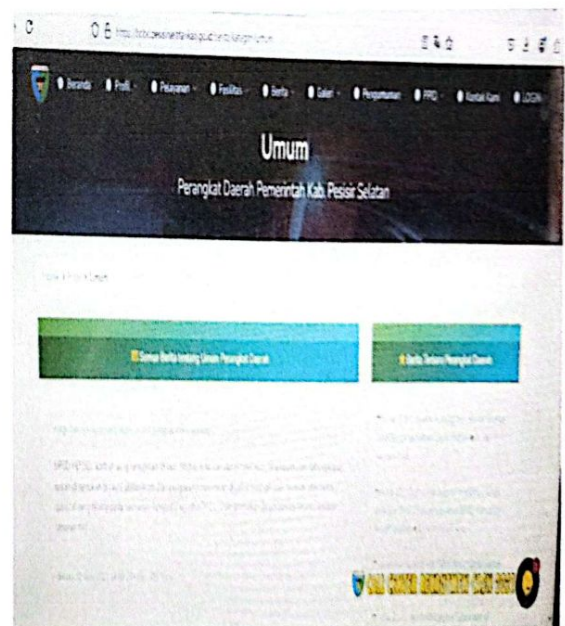
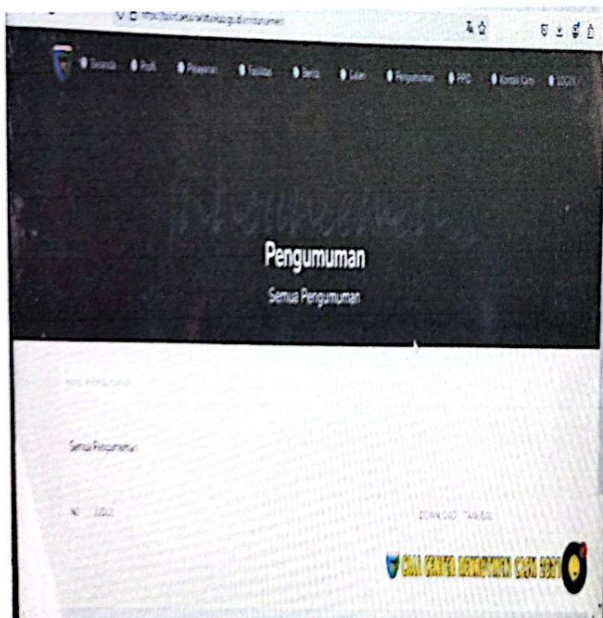
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan

Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://bpbd.pesisirselatankab.go.id/#> dengan tampilan sebagai berikut :





**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	KATEGORI KEBERHASILAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	1. Meningkatkan Penanganan PMM (Pencegahan dan Pemantauan)	1. Nilai AKIP PMM	90 (77)
2	2. Meningkatkan Kualitas Informasi Bencana	2. Nilai Skor angket Kepuasan Masyarakat	91
3	3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan dan Mitigasi Bencana	3. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bencana	12
		4. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bencana	4
		5. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bencana	5

No	Program	Anggaran	Rentang
1	Program Peningkatan Penanganan Bencana Kabupaten	Rp 2.700.000.000	60 hari anggaran
2	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	Rp 2.000.000.000	60 hari anggaran
	Jumlah	Rp 4.700.000.000	60 hari anggaran

Pesisir, 15 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Wakil Bupati
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

(H. HENDRAGIONI, S.H., MH)
Nip. 19770123 199003 1 004

Gambar 3.2 :Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

2. Pengukuran Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment

3. Pelaporan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3.4 : Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik dan berjenjang melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti gambar 3.7 dan 3.8 dibawah ini:



Semua pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten selama tahun 2025 dilakukan publikasi pada media sosial yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. **Instagram** : **bpbdkabpessel**



2. **Facebook** : **bpbdkabpessel**

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran					Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja		B (77)	B(67,67)	87,88	3.794.280.976	3.336.877.501	87,94	12,06

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100 \%$$

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 adalah B (77), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 sebesar B (67,67).

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu:

1) Perencanaan Kinerja

Agar melakukan monitoring capaian kinerja pada seluruh kriteria yang telah ditetapkan dilaksanakan setiap bulan.

2) Pengukuran Kinerja

a) Agar mendorong seluruh Unit/Satuan Kerja dan Pegawai untuk peduli dan berkomitmen dalam pencapaian kinerja yang lebih baik sesuai target yang telah

ditetapkan; dan

- b) Agar setiap level organisasi melakukan secara maksimal pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala.
- 3) Pelaporan Kinerja
- a) Agar penyajian informasi dalam proses laporan kinerja sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai; dan
 - b) Agar informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan diharapkan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja serta melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

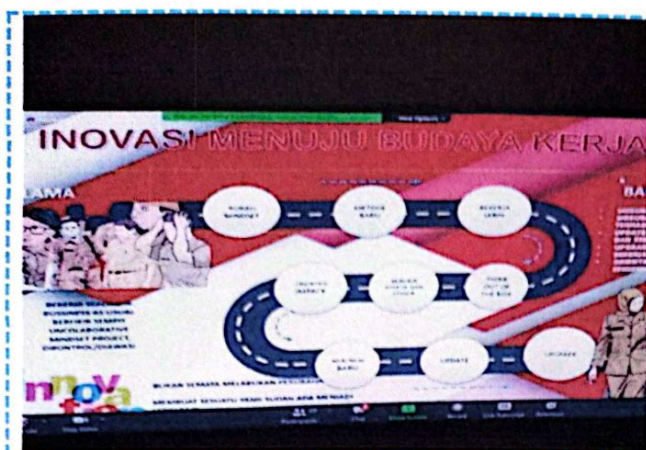
g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program ini ada 1 (satu) kegiatan dengan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - o Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan:
 - o Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - o Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 - o Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - o Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - o Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Sub Kegiatan:
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp.5.814.110.800 atau 87,18% dari total realisasi anggaran sebesar Rp.5.069.147.226, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 12,81%.



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.8
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi	Tanpa Satuan	91	90	99
Rata-rata capaian (%)						99

Dari tabel 3.8 dan diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencapai 90 dari target 99 atau tingkat capaiannya mencapai 99%

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92	89	90

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026.

Dari tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1% dari 89 pada tahun 2024 menjadi 90 pada tahun 2025.

c. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	41,00	89,00	91

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024.

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 48% dari 41,00 pada Tahun 2023 menjadi 89,00 pada Tahun 2024.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tanpa Satuan	91	90	98,90	Kurang tercapainya target Inovasi tahun 2025 dikarenakan belum terlaksana dengan baik.	Melengkapi kekurangan yang belum tercapai.

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91	90	98				

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun berikutnya adalah :

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Dimana pada Tahun 2025 Inovasi BPBD terletak pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu Kajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (AJI PASNA).

Indikator Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (Satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Daerah.



SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8

Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Pratama	Nagari	12	3	25
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	Nagari	6	0	0
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	Nagari	5	0	0

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Pratama	182	51	15	12
		Jumlah Nagari Tangguh Madya		2	2	6
		Jumlah Nagari Tangguh Utama		5	5	5

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Pratama	3	12	25	
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	0	5	0	
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	0	6	0	

Sumber : Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Pratama	Nagari	12	3	25	Tidak tersedianya anggaran pendukung kegiatan tersebut	Melakukan kerja sama dengan nagari untuk membentuk nagari tangguh Pratama
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	Nagari	5	0		Tidak tersedianya anggaran pendukung kegiatan tersebut	Melakukan kerja sama dengan nagari untuk membentuk nagari tangguh Madya

		Jumlah Nagari Tangguh Utama	Nagari	6	0		Tidak tersedianya anggaran pendukung kegiatan tersebut	Melakukan kerja sama dengan nagari untuk membentuk nagari tangguh Utama
--	--	-----------------------------	--------	---	---	--	--	---

Sumber : Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan Tahun 2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Reallsasj	% Capalan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Jumlah Nagari Tangguh Pratama	12	3	25	503.910.446	394.252.040	78,23	100
		Jumlah Nagari Tangguh Madya	5						
		Jumlah Nagari Tangguh Utama	6						

Sumber : Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tahun 2026

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam Melaksanakan Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut terdapat kendala Tidak tersedianya anggaran pendukung kegiatan tersebut Sehingga Mengakibatkan tidak tercapainya target indikator Kinerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Melakukan kerja sama dengan nagari untuk membentuk Nagari Tangguh Pratama, Madya dan Utama Tersebut.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 pada Tabel 3.21 berikut.

TABEL. URUSAN WAJIB ANGGARAN TAHUN 2025

No	URUSAN WAJIB DAN/PROGRAM/KEGIATAN		BELANJA (Rp)		
			ANGGARAN	REALISASI	%
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5.614.110.800	5.069.147.226	90,29
I	(01)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.794.280.976	3.336.827.501	87,94
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.587.533	27.320.141	86,49
2	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.025.611.727	2.699.343.034	89,21
3	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.800.000	99.300.001	98,51
3	03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.309.275	153.735.444	63,97
4	04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.519.980	48.375.945	97,68
5	05	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000	64.173.660	91,67
6	06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.452.461	244.579.276	88,47
II	02	PROGRAM PENANGGULANGAN	2.019.829.824	1.732.319.725	85,76

		BENCANA			
7	07	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	297.077.160	296.615.650	99,84
8	08	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	206.633.286	97.636.360	47,25
9	9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.427.224.474	1.251.891.287	87,71
10	10	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	88.694.904	86.176.398	97,16

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Plafon anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. **5.614.110.800,-** dan terealisasi sebesar Rp. **5.069.147.226,-** atau sebesar 90,29%.
2. Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan kegiatan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.744.963.574 atau sebesar 9,71%.

3.5. CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH

Kinerja Kementerian Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Bapedalitbang merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Bapedalitbang 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 98,19% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata nilai capaian indikator kinerja adalah 99,45% dengan kategori **sangat baik**, dengan nilai tertinggi adalah 101,10% yaitu pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri.

2. Capaian Indikator Kinerja

Jika dilihat dari realisasi 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target A (89,98). Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah A (89,50) atau sebesar 99,47% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini memakai nilai evaluasi tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja tahun 2025 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret tahun 2026.
- b. Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target 91. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 90 atau sebesar 98% dengan predikat **baik**.